KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - BAHRAIN

I. PEMBUKAAN

Hubungan diplomatik Indonesia - Bahrain resmi dimulai pada 1976 melalui keanggotaan bersama di OKI. Momentum pentingnya antara lain kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Manama (2000), pembukaan KBRI di Bahrain (2010) dan Kedubes Bahrain di Jakarta (2016), serta penandatanganan berbagai MoU, termasuk konsultasi politik (2015), komite bersama, dan pembebasan visa diplomatik (2019). Bahrain dipandang sebagai pintu masuk Indonesia ke GCC, sementara Indonesia menjadi akses Bahrain ke ASEAN, dengan potensi penguatan hubungan melalui penerbangan langsung dan forum bisnis guna mendukung kemitraan jangka panjang.

Kerja sama kedua negara berfokus pada bidang ekonomi, dengan nilai perdagangan 2024 mencapai USD239,6 juta, ekspor utama Indonesia mencakup mobil, CPO, dan tekstil, sedangkan impor dari Bahrain meliputi gas petroleum dan aluminium. Isu strategis meliputi investasi di perbankan syariah, keamanan pangan, pelindungan pekerja migran Indonesia di Bahrain, serta kolaborasi keamanan dalam memerangi terorisme dan perdagangan manusia.

II. SEJARAH HUBUNGAN DIPLOMATIK

Hubungan diplomatik Indonesia – Bahrain berakar pada kesamaan nilai sebagai negara mayoritas Muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dengan komitmen terhadap perdamaian, koeksistensi, dan kerja sama regional. Sejak pengakuan Bahrain pada 1971 dan pembentukan hubungan resmi pada 1976[1], interaksi bilateral

[1] Diplomatic Milestones: Kementerian Luar Negeri RI, “Hubungan Bilateral Indonesia-Bahrain,” https://kemlu.go.id/manama/kebijakan/hubungan-bilateral/bahrain

berkembang secara positif tanpa hambatan politik yang berarti. Meski awalnya berjalan lambat karena fokus domestik masing-masing, hubungan kedua negara menguat melalui forum multilateral seperti OKI dan ASEAN–GCC, dengan titik berat pada kerja sama ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan perlindungan pekerja migran. Bahrain dipandang sebagai pintu masuk strategis Indonesia ke GCC, sementara Indonesia menjadi mitra penting Bahrain untuk menjangkau pasar ASEAN.

Tonggak penting yang menandai perjalanan hubungan ini antara lain kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Bahrain pada Juni 2000, menandai awal kerja sama bilateral kedua negara. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2010, Indonesia membuka KBRI Manama, Bahrain, menandakan peningkatan kehadiran diplomatik Indonesia di wilayah Teluk. Pada tahun 2015, dilakukan penandatanganan MoU Konsultasi Politik di New York, AS, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB sebagai kerangka bilateral. Kemudian pada tahun 2016, Bahrain membuka Kedutaan Besar di Jakarta sebagai wujud komitmen kerja sama timbal balik.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antar kedua negara semakin intensif dicerminkan dari peningkatan total perdagangan bilateral yang mencapai USD239,6 juta pada 2024 dengan tren positif (4,57%), kolaborasi di bidang pendidikan dan budaya, serta kunjungan tingkat tinggi, termasuk delegasi parlemen Bahrain ke Jakarta pada Mei 2025 dan undangan Raja Bahrain kepada Presiden RI untuk melakukan kunjungan resmi.

III. KUNJUNGAN TINGKAT TINGGI

A. Pertemuan di Tingkat Presiden

Kunjungan tingkat tinggi antara Indonesia dan Bahrain memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan bilateral yang terus berkembang. Pada tingkat kepala negara, tonggak awal ditandai dengan kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Manama pada Juni 2000, yang menghasilkan kesepakatan untuk memperluas kerja sama politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus saling mendukung pencalonan

di berbagai forum internasional. Dalam beberapa tahun berikutnya, komunikasi antar pemimpin terus berlanjut, termasuk undangan Presiden RI kepada Raja Bahrain untuk berkunjung ke Jakarta pada 2017, serta pertemuan Presiden RI dengan Pangeran Shaikh Khalid bin Hamad Al Khalifa di Jakarta pada 2018. Pertemuan tersebut memperbarui undangan kunjungan kenegaraan timbal balik, dengan harapan terwujudnya kunjungan resmi pertama Raja Bahrain ke Indonesia.

B. Pertemuan di Tingkat Menteri dan Pejabat Tinggi

Pada tingkat menteri dan pejabat tinggi, diplomasi kedua negara semakin intensif. Menlu RI Retno Marsudi bertemu Menlu Bahrain pada Mei 2019 di Makkah untuk membahas isu Palestina, serta melakukan kunjungan resmi ke Manama pada September 2019, menghasilkan sejumlah capaian penting, termasuk MoU pembebasan visa diplomatik, pembentukan *Joint Commission Meeting*, rencana penerbangan langsung Jakarta-Manama, serta kerja sama pemberantasan TPPO. Di bidang hukum, Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali melakukan kunjungan ke Bahrain pada 2018 untuk menandatangani *Letter of Intent* (LoI) mengenai kerja sama manajemen peradilan.

C. Pertemuan di Tingkat Parlemen

Kerja sama parlemen juga menjadi pilar penting dalam hubungan bilateral. Sejak penandatanganan MoU antarparlemen pada 2017, intensitas kunjungan terus berlanjut melalui delegasi DPR RI ke Bahrain pada 2018 dan 2019, serta partisipasi BKSAP DPR dalam berbagai forum internasional yang diselenggarakan di Manama, termasuk *IPU Assembly* (2023) dan Sidang APA (2024). Pada Mei 2025, parlemen Bahrain melakukan kunjungan balasan ke DPR RI, sekaligus menyampaikan undangan resmi Raja Bahrain kepada Presiden RI.

IV. KERJA SAMA YANG DILAKUKAN KEDUA NEGARA

A. Kerja Sama Ekonomi

Perdagangan

Hubungan perdagangan Indonesia dan Bahrain terus menunjukkan perkembangan meskipun nilainya relatif kecil dibanding negara Teluk lain. Pada tahun 2024, total perdagangan tercatat mencapai USD239,6 juta atau meningkat 13,8% dari tahun 2023 yang hanya mencapai USD210,5 juta. Sepanjang 2020–2024, Indonesia selalu mencatat defisit, namun kecenderungannya semakin menurun. Bahkan, pada 2024 ekspor Indonesia melonjak 116,63% hingga USD 114,6 juta sementara impor turun 20,62% menjadi USD 125,1 juta, sehingga defisit menyempit tajam menjadi hanya USD 10 juta.

MATRIKS NERACA PERDAGANGAN RI-BAHRAIN[2]

2020-2024

*Nilai: Juta USD

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Trend (%) 20-24	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2025	Perub. (%) 25/24
TOTAL PERDAGANGAN	**170.1**	**267.2**	**225.5**	**210.5**	**239.6**	**4.57**	**101.7**	**72.5**	**-28.65**
MIGAS	111.0	175.8	122.9	119.4	121.2	-2.08	63.8	42.5	-33.39
NON MIGAS	59.1	91.4	102.6	91.0	118.4	14.87	37.9	30.1	-20.69
EKSPOR	**38.0**	**44.1**	**44.5**	**52.9**	**114.6**	**26.96**	**57.6**	**19.7**	**-65.84**
MIGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	0.00	29.3	0.0	0.00
NON MIGAS	38.0	44.1	44.5	52.9	85.3	19.68	28.4	19.7	-30.62
IMPOR	**132.1**	**223.1**	**181.0**	**157.6**	**125.1**	**-4.46**	**44.0**	**52.8**	**20.04**
MIGAS	111.0	175.8	122.9	119.4	92.0	-7.35	34.5	42.5	23.13
NON MIGAS	21.1	47.3	58.1	38.2	33.1	7.15	9.5	10.4	8.86
NERACA PERDAGANGAN	**-94.0**	**-179.0**	**-136.4**	**-104.7**	**-10.5**	**38.86**	**13.6**	**-33.2**	**-343.54**
MIGAS	-111.0	-175.8	-122.9	-119.4	-62.7	14.18	-5.2	-42.5	-712.61
NON MIGAS	17.0	-3.2	-13.6	14.7	52.2	0.00	18.8	9.3	-50.59

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

Upaya memperluas akses pasar dilakukan melalui penjajakan I-GCC FTA dan mendorong sinergi antara KADIN dengan I*ndonesia-Bahrain Business Council*.

[2] Data Neraca Perdagangan (2020-2024): Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang – Bahrain," akses melalui https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang

Beberapa peluang yang tengah dijajaki antara lain peningkatan ekspor produk strategis Indonesia serta rencana pendirian pabrik makanan di Bahrain untuk pasar kawasan.

Investasi

Investasi Bahrain di Indonesia masih relatif terbatas, terutama di sektor jasa keuangan melalui *Al Baraka Banking Group* yang berfokus pada perbankan syariah. Namun, operasional penuh masih menunggu proses akuisisi bank lokal. Data BKPM mencatat realisasi investasi Bahrain sebesar USD1,59 juta untuk 13 proyek dalam periode 2014–2019, dengan tambahan lima proyek bernilai USD267,8 ribu pada 2023.

Meski nilainya kecil, potensi kerja sama tetap terbuka, terutama pada sektor perbankan syariah, industri, dan perdagangan. Hal ini sejalan dengan posisi Bahrain sebagai salah satu pusat finansial Islam di kawasan Teluk.

Pariwisata

Kerja sama pariwisata antara Indonesia dan Bahrain menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah wisatawan Bahrain yang datang ke Indonesia terus meningkat, dari 1.825 orang pada 2023 menjadi 2.107 orang sepanjang 2024[3]. Wisatawan Bahrain umumnya tertarik pada keindahan alam Indonesia, mulai dari pantai dan pegunungan hingga wisata bahari, serta pengalaman belanja di destinasi populer seperti Bali, Jakarta, dan Yogyakarta. Untuk memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi unggulan,

Dari sisi kebijakan, Indonesia mulai memberlakukan bebas visa bagi warga Bahrain sejak Oktober 2024, sementara Bahrain menyediakan fasilitas *Visa on Arrival* (VoA) bagi WNI, yang semakin mempermudah mobilitas wisatawan kedua negara. Konektivitas udara juga menjadi fokus, dengan rencana penerbangan langsung Jakarta-Manama oleh Gulf Air yang masih dalam tahap pembahasan terkait hak udara, serta kehadiran Lion Air yang membuka 70 penerbangan mingguan dari

[3] Data Wisatawan: Badan Pusat Statistik RI, “Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan – 2024,” https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MCMy/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-menurut-kebangsaan--kunjungan-.html

berbagai kota di Indonesia menuju Jeddah. Hal ini memperkuat posisi Bahrain sebagai hub perjalanan religi, khususnya bagi jemaah umrah Indonesia yang jumlahnya mencapai 1,2 juta orang pada 2024. Kerja sama pariwisata ini semakin relevan dalam konteks promosi pariwisata halal dan forum bisnis ASEAN-GCC, yang menempatkan Bahrain sebagai pintu masuk strategis Indonesia ke kawasan Teluk.

B. Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan

Kerja sama pertahanan dan keamanan Indonesia-Bahrain terus berkembang dengan fokus pada pemberantasan terorisme, perdagangan manusia, dan penguatan kapasitas militer. Pertemuan Menhan RI Prabowo Subianto dengan Putra Mahkota Bahrain pada Forum *IISS Manama Dialogue* 2021 menegaskan komitmen peningkatan kerja sama pertahanan untuk kepentingan bersama.

Selain itu, Indonesia mendorong kerja sama industri pertahanan melalui penawaran produk strategis BUMN pertahanan, sementara Bahrain tertarik pada pelatihan militer bersama dan pertukaran intelijen. Pada 2023, kedua negara sepakat memperluas dialog keamanan lewat platform ASEAN-GCC dan aktif dalam forum multilateral seperti ADMM-Plus. Meski belum ada latihan militer bilateral resmi, kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama memperkuat stabilitas kawasan dan memanfaatkan posisi Bahrain sebagai hub strategis di Teluk bagi diplomasi pertahanan Indonesia.

C. Kerja Sama Ilmiah, Teknologi dan Inovasi

Meskipun belum memiliki payung hukum kerja sama (*MoU/Agreement*), kerja sama ilmiah, teknologi, dan inovasi Indonesia-Bahrain berfokus pada pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi. Sejak kunjungan Menlu RI ke Manama pada 2019, kedua negara sepakat untuk memperkuat pertukaran akademik, beasiswa, dan pelatihan, termasuk kolaborasi perguruan tinggi di bidang keuangan syariah dan teknologi finansial. Kini kerja sama meluas ke teknologi hijau, energi terbarukan, serta inovasi digital seperti *agritech* dan *edtech*, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang kedua negara.

D. Kerja Sama Sosial dan Budaya

Bidang sosial budaya menjadi salah satu pilar kerja sama yang aktif. Melalui kemitraan dengan *Bahrain Authority for Culture and Antiquities* (BACA), Indonesia kerap mempromosikan budaya dan seni di Bahrain. Di bidang pendidikan, sejumlah perguruan tinggi Indonesia seperti IPB, UI, dan STEI Tazkia telah menjalin kolaborasi dengan universitas di Bahrain dalam pertukaran akademik, penelitian, dan pengembangan ekonomi syariah.

Di bidang olahraga, kerja sama terlihat jelas ketika Bahrain mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta, sementara Indonesia turut memfasilitasi kegiatan bela diri *Brave 12* yang diselenggarakan Bahrain di Jakarta.

Selain itu, keberadaan *Bahrain-Indonesia Friendship and Business Society* (BIFBS) sejak 2017 turut memperkuat hubungan di jalur informal, khususnya di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan sosial masyarakat.

E. Kerja Sama Kesehatan

Pada tahun 2019, kedua negara sepakat memperkuat kolaborasi melalui pertukaran tenaga medis dan pelatihan, sebagaimana dibahas dalam kunjungan Menlu RI ke Manama. Bahrain menunjukkan minat terhadap produk alat kesehatan Indonesia, dengan potensi transaksi sebesar USD825 ribu untuk furnitur rumah sakit melalui PT Mega Andalan Kalasan di Pameran *Arab Health 2024*. Indonesia juga mendorong pelatihan tenaga kesehatan untuk memenuhi standar internasional, seperti ujian Prometric, guna mendukung penempatan perawat Indonesia di Bahrain. Kerja sama ini diperkuat melalui platform ASEAN-GCC dan OIC, dengan rencana pengembangan teknologi kesehatan digital dan vaksinasi haji/umrah hingga 2026.

F. Kerja Sama Lingkungan dan Iklim

Kerja sama lingkungan dan iklim antara Indonesia dan Bahrain masih dalam tahap awal, namun menunjukkan potensi melalui platform multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) dan ASEAN-GCC. Pada Desember 2024, delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Sidang *Standing Committee on Economic and Sustainable Development of the Asian Parliamentary Assembly* (APA) di Manama, Bahrain, membahas isu lingkungan, pembiayaan iklim, dan pencapaian SDGs. Indonesia mempromosikan pengelolaan hutan tropis dan

karbon biru (*blue carbon*) sebagai bagian dari strategi FOLU Net Sink 2030, sementara Bahrain berfokus pada energi terbarukan dan pengelolaan air. Meskipun belum ada MoU bilateral khusus, kedua negara sepakat menjajaki kolaborasi dalam teknologi hijau dan adaptasi perubahan iklim.

V. DIASPORA DAN PELINDUNGAN WNI

Berdasarkan data *Labour Market Regulatory Authority* (LMRA) Bahrain yang dilaporkan KBRI Manama, jumlah WNI di Bahrain per Juni 2024 tercatat sebanyak 6.965 orang**,** dengan komposisi 93% perempuan dan 7% laki-laki. Dari total tersebut, sekitar 85% WNI perempuan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor domestik sebagai penata laksana rumah tangga. Sementara itu, WNI di sektor formal bekerja di berbagai bidang, antara lain pemerintahan, pendidikan (dosen), penerbangan (pilot), perminyakan, industri, konstruksi, serta kelautan.

Namun demikian, sekitar 15% WNI di Bahrain berstatus kaburan/*runaway* atau *overstayer*. Setiap minggu, rata-rata terdapat 5-9 PMI yang meminta perlindungan di *shelter* KBRI Manama, dengan penyelesaian kasus yang bervariasi antara 2 hingga 36 minggu, tergantung kompleksitas masalah yang dihadapi (pidana, keimigrasian, atau ketenagakerjaan).

Permasalahan umum yang dialami PMI meliputi: tindak pidana asusila (termasuk perkosaan dan pelecehan seksual), kasus zina/pernikahan siri, kekerasan fisik maupun verbal, keterlambatan atau tidak dibayarkannya gaji, larangan cuti dan kepulangan setelah dua tahun bekerja, tidak memiliki izin kerja atau izin tinggal, paspor maupun izin tinggal yang sudah kedaluwarsa, tuduhan pencurian, hingga kabur dari majikan karena beban kerja berat, *cultural shock*, atau kondisi kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Sebagai upaya perlindungan WNI, Pemerintah RI telah menyampaikan usulan *draft MoU on Cooperation in Combating Trafficking in Persons and Protection of Victims of Trafficking* kepada Bahrain sejak September 2016. Namun, hingga kini belum ada tanggapan. Meskipun Bahrain masuk ke dalam *Tier 1 Status US Department of State Trafficking in Persons* selama 8 tahun berturut-turut dan menunjukkan komitmen kuat

dalam penanganan TPPO, kerja sama ini mendesak mengingat kasus TPPO yang dialami WNI di Bahrain tercatat juga masih terjadi.

VI. FORUM DAN MEKANISME KELEMBAGAAN

Indonesia dan Bahrain memiliki dua mekanisme pertemuan bilateral antar-Kemlu, yaitu Konsultasi Politik (Konspol) yang disepakati pada 2015, serta Sidang Komisi Bersama (SKB) yang ditandatangani pada 2019. Pertemuan Konspol pertama berlangsung di Jakarta pada 2018 dan menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Rencana penyelenggaraan Konspol kedua di Manama sempat tertunda akibat pandemi, dan kini kedua pihak tengah membahas jadwal baru, dengan perkiraan berlangsung pada akhir tahun 2025.

Selain itu, Indonesia dan Bahrain juga aktif saling mendukung pencalonan di berbagai organisasi internasional. Bahrain mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2026-2027, sementara Indonesia tengah menggalang dukungan untuk DK PBB periode 2029-2030 serta sejumlah komite PBB lainnya.

Di tingkat kawasan, Bahrain termasuk negara GCC yang cukup aktif menjalin hubungan dengan ASEAN. Setelah mengakses *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) pada 2019, Bahrain menginisiasi *ASEAN-Bahrain Council*, menjadi pengamat di AIPA (2024), dan kini tengah mengajukan diri sebagai *Sectoral Dialogue Partner* (SDP) ASEAN. Secara lebih luas, kerja sama RI–GCC semakin erat dengan dimulainya perundingan *Indonesia-GCC Free Trade Agreement* (I-GCC FTA) pada Juli 2024, yang diharapkan membuka peluang besar di bidang perdagangan, investasi, energi, dan ekonomi digital.

VII. *HIGHLIGHT* STRATEGIS DAN ASTA CITA

Sejak hubungan diplomatik terjalin pada 1976, Indonesia dan Bahrain terus membangun kemitraan strategis di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, energi, pendidikan, hingga keamanan maritim. Kerja sama ini sejalan dengan arah pembangunan nasional Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, ketahanan energi, serta penguatan posisi Indonesia di tingkat global.

Perdagangan kedua negara tumbuh pesat, dengan nilai mencapai USD239,6 juta pada 2024. Kini, fokus kerja sama juga mulai merambah sektor energi baru terbarukan. Bahrain, melalui *Economic Vision 2030*[4], berbagi pengalaman dalam pengelolaan energi bersih, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga surya. Di sisi lain, Indonesia melalui PT PLN membuka peluang investasi pada proyek-proyek energi hijau yang mendukung Asta Cita poin ketiga, yakni ketahanan pangan dan energi. Kunjungan delegasi bisnis Bahrain ke Jakarta pada April 2025 pun membahas peluang investasi di bidang logistik dan pelabuhan, sejalan dengan Asta Cita poin kelima tentang penguatan ekonomi berbasis kemitraan internasional.

Kerja sama di bidang pendidikan dan keamanan maritim juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada 2024, diluncurkan program beasiswa bersama antara Kementerian Pendidikan RI dan Tamkeen Bahrain bagi 50 pelajar Indonesia untuk menempuh studi di bidang teknologi dan bisnis. Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita poin kedua terkait pengembangan SDM unggul. Di sisi lain, kerja sama keamanan maritim diperkuat melalui forum *Indian Ocean Rim Association (IORA)* untuk menangani isu *piracy* dan *illegal fishing* di jalur perdagangan internasional. Sinergi ini semakin nyata dengan latihan gabungan antara Bakamla *Indonesia-Bahrain Coast Guard* di Teluk Persia pada Juni 2025.

Dengan posisi Bahrain sebagai hub logistik di kawasan Teluk dan Indonesia sebagai kekuatan maritim di ASEAN, kolaborasi ini memperkuat konektivitas global dan menjadikan Bahrain mitra penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

VIII. PENUTUP

KBRI Manama

Alamat	:	Villa 2113, Road 2432, Block 324, Juffair, P.O. Box 75109 Manama, Kingdom of Bahrain
Telepon	:	+973 17400164 dan +973 38791650 (*Hotline*)

[4] Bahrain Economic Vision 2030: Bahrain Ministry of Finance , “Bahrain Economic Vision 2030,” https://www.mofne.gov.bh/en/project-initiatives/bahrain-economic-vision-2030/

E-mail	:	manama.kbri@kemlu.go.id dan indonesia.manama@batelco.com.bh
Website	:	https://kemlu.go.id/manama
Duta Besar	:	Y.M. Bapak Ardi Hermawan (Februari 2022)

Kedubes Bahrain di Jakarta

Alamat	:	Jl. Banyumas No.2, RT.3/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon	:	(021) 2527785/6
E-mail	:	jakarta.mission@mofa.gov.bh
Website	:	https://www.mofa.gov.bh/jakarta/en/home/
Duta Besar	:	Y.M. Ahmed Abdulla Alharmasi Alhajeri (Oktober 2021)

---o0o---